

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR (PERDA NTT)
NOMOR 8 TAHUN 2001 (8/2001)

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2001 - 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa program pembangunan daerah yang dimuat dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 - 2004 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa upaya melaksanakan program pembangunan daerah pada saat reformasi, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Daerah yang memuat program pembangunan daerah untuk Tahun Anggaran 1999/2000;
- c. bahwa dalam pelaksanaan operasional pembangunan di daerah Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2000 dan telah dipertanggungjawabkan;
- d. bahwa pelaksanaan program pembangunan di Nusa Tenggara Timur harus dilakukan dalam sisa kurun waktu Tahun Anggaran 2001 - 2004;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 - 2004;

Mengingat: 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 11. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 264);
 12. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 347 Seri D Nomor 347);
 13. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 349 Seri D Nomor 349);
 14. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor [11 Tahun 2000](#) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 353 Seri D Nomor 353);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2001 - 2004.

Pasal 1

Sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 - 2004 sebagai berikut:

BAB IPendahuluan.

BAB IIKondisi Umum.

BAB IIIVisi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pembangunan Daerah.

BAB IVAras Pembangunan Daerah.

BAB VKaidah Pelaksanaan.

BAB VIPenutup.

Pasal 2

Isi beserta uraian sesuai sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dijadikan acuan dalam Penyusunan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum termuat dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 - 2004 akan dijabarkan dalam Program Pembangunan Daerah (PREPEDA) Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 23 Agustus 2001
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

TTD.

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 23 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 181 SERI D NOMOR 179

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2001 - 2004

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran

Siklus perencanaan mengalami perubahan paradigma mendasar sejak reformasi tahun 1998 digulirkan. Pada periode sebelumnya, siklus perencanaan dimulai dengan pola sebagai berikut:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai representasi rakyat Indonesia menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN);
2. Berdasarkan GBHN Pemerintah menjabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun;
3. Di tingkat daerah, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan GBHN menjabarkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah;
4. Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Nasional maka Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota menjabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah;

Sejak tahun 1998, situasi reformasi politik menghendaki adanya perubahan siklus perencanaan berdasarkan TAP MPR Nomor X/MPR/Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan yang mendasari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan dan selanjutnya Pemerintah Propinsi menjabarkan dalam Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah yang berlaku tanggal 1

April 1999 sampai dengan 31 Maret 2000.

Dalam rangka mengoperasionalkan Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah tersebut maka penjabaran selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 1999. Pada Tahun Anggaran 2000 pembangunan dilaksanakan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000.

Selanjutnya dalam sisa kurun waktu antara tahun 2001 - 2004 maka Pedoman Pembangunan di Daerah mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 - 2004 sebagai pedoman umum bagi seluruh unsur aparatur Pemerintah Daerah, DPRD, Organisasi Sosial Kemasyarakatan/LSM, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam jangka waktu empat tahun, guna mewujudkan pertumbuhan dan kemajuan Daerah diberbagai bidang.

Pembangunan daerah merupakan suatu rangkaian hubungan fungsional dan sinergis dari berbagai kegiatan bidang-bidang pembangunan daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dan pembangunan nasional. Oleh karena itu perkembangan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengaruh perkembangan pembangunan nasional. Pembangunan daerah meliputi berbagai kegiatan yang saling berkaitan dalam proses Pembangunan nasional dengan melaksanakan azas-azas desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan secara terpadu, terarah dan proporsional.

Setiap relevansi pembangunan daerah akan menentukan komposisi kegiatan bidang-bidang pembangunan secara terpadu. Dalam hubungan ini dibutuhkan pendekatan-pendekatan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan berwawasan lingkungan spesifik daerah Nusa Tenggara Timur, dalam cakrawala pembangunan nasional yang berpedoman pada Garis-garis Besar Haluan Negara. Untuk itu perlu disusun kebijakan pembangunan daerah yang berbasis tata ruang yang terstruktur sesuai dengan permasalahan, tantangan, kendala, potensi serta peluang dan aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Searah dengan reformasi di segala bidang, pembangunan daerah melaksanakan paradigma baru pembangunan yang berfokus pada manusia. Perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada penciptaan kegiatan-kegiatan produktif yang lebih berpihak kepada kelompok masyarakat yang tertinggal dan memiliki kemampuan yang rendah, untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka implementasi otonomi daerah.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka mengatur dan mengendalikan proses pembangunan daerah yang kompleks, luas dan dinamis, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur menetapkan visi, misi dan strategi serta arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Pola Dasar

Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2004.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah pokok-pokok kebijakan pembangunan daerah sebagai pernyataan kehendak rakyat Nusa Tenggara Timur mengenai visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyusunan dan penetapan Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan di daerah, dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur disusun dengan landasan Idiil: Pancasila, landasan Konstitusional Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Landasan Operasional: Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999.

Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 S/D 5
Cukup Jelas

DAFTAR ISI

	Halaman
PERATURAN DAERAH POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2001-2004	i
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DASAR PEMIKIRAN	1
B. PENGERTIAN	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	2
D. LANDASAN	3
E. ASAS	3
F. RUANG LINGKUP	4
G. SISTEMATIKA	5
BAB II	
KONDISI UMUM	6
A. KONDISI DAERAH	6
B. POTENSI	7
1. Sumber Daya Alam	7

	2. Sumber Daya Manusia	8	
	3. Sumber Daya Investasi		8
C.	HASIL-HASIL PEMBANGUNAN		9
	1. Ekonomi Rakyat	9	
	2. Pembangunan Pendidikan Rakyat	10	
	3. Pembangunan Kesehatan Rakyat		11
	4. Perkembangan Pembangunan Lintas Daerah Kota/Kabupaten	12	
D.	PERMASALAH POKOK PEMBANGUNAN DAERAH		12
	1. Rendahnya Kinerja Perekonomian Rakyat		12
	2. Masih Tingginya Jumlah Penduduk Miskin		14
	3. Rendahnya Tingkat Pendidikan Rakyat	15	
	4. Rendahnya Tingkat Kesehatan Rakyat	16	
	5. Partisipasi Masyarakat		17
	6. Pelaksanaan Otonomi Daerah		18
	7. Belum Meratanya Penyebaran Infrastruktur	18	
	8. Pengelolaan Lingkungan Yang Belum Optimal	19	
	9. Tata Ruang		19
	10. Penyelesaian Pengungsi Timor Timur	20	
	11. Tantangan Globalisasi		20
	12. Lemahnya Penegakan Hukum dan HAM		20
BAB III	VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH		22
	A. Visi		22
	B. Misi		22
	C. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH		23
	D. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH	23	
BAB IV	ARAH PEMBANGUNAN DAERAH		24
	1. Bidang Ekonomi		24
	2. Bidang Pendidikan	26	
	3. Bidang Kesehatan		27
	4. Bidang Kesejahteraan Sosial	27	
	5. Bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia		29
	6. Bidang Politik dan Pemerintah		29
	7. Bidang Agama	30	
	8. Bidang Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat		30
	9. Bidang Tata Ruang	31	
BAB V	KAIDAH PELAKSANAAN		32
BAB VI	PENUTUP		33

Lampiran: Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur
 Nomor: 8 Tahun 2001
 Tanggal: 23 Agustus Tahun 2001

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS)
 PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 TAHUN 2001 - 2004

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai proses demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa perubahan paradigma pembangunan daerah yang bersifat sentralistik ke desentralistik. Konsekuensinya, pembangunan daerah tidak semata-mata mengacu pada ketentuan-ketentuan dari pusat, tetapi merupakan prakarsa sendiri yang lebih mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat. Pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, bukan merupakan replikasi pembangunan nasional di daerah atau totalitas pembangunan sektoral, namun tetap merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah tidak saja memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri, tetapi sekaligus membuka peluang bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat sebagai tuntutan demokratisasi pembangunan daerah, membawa konsekuensi pemberdayaan masyarakat sebagai konsep kunci pembangunan daerah, sekaligus menempatkan manusia sebagai pelaku utama pembangunan.

Tingkat kemajuan pembangunan daerah berkaitan erat dengan tingkat investasi sumber daya manusia, namun dalam banyak hal, sumber daya manusia justru menjadi persoalan dan beban pembangunan. Masalah Pokok yang dihadapi masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah kekurangan tenaga terampil dan kelebihan tenaga kerja tidak terdidik di sektor tradisional dan sektor modern. Upaya pemecahnya, adalah meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, baik dari segi keahlian, keterampilan maupun budaya kerja.

Berdasarkan perubahan paradigma pembangunan daerah yang bertumpu pada pemberdayaan manusia dan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, maka pendekatan teknokratis dan paternalistik harus ditinggalkan dan beralih kepada pendekatan dialogis dan partisipatif dalam iklim demokratis, berwawasan kependudukan dan berwawasan lingkungan spesifik daerah Nusa Tenggara Timur. Untuk itu perlu disusun kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan, tantangan, kendala, potensi, peluang dan aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Timur, oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2001 - 2004.

B. PENGERTIAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah pokok-pokok kebijakan pembangunan daerah sebagai kehendak rakyat yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dan penetapan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dimaksudkan untuk memberikan arah

pengelolaan pembangunan kepada seluruh komponen pembangunan yaitu pemerintah dan masyarakat di daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang bertanggungjawab dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. LANDASAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur disusun dengan landasan sebagai berikut:

- a. Landasan Idiil: Pancasila
- b. Landasan Konstitusional: Undang-undang Dasar 1945
- c. Landasan Operasional: Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999

E. ASAS

Asas-asas umum pengelolaan pembangunan daerah meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum

Seluruh komponen pengelola dan pengelolaan pembangunan daerah di lingkup pemerintah dan masyarakat harus tunduk dan taat pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai langkah konkrit mewujudkan supremasi hukum.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Pembangunan

Pengelolaan pembangunan daerah harus memperhatikan tertib administrasi dan manajemen berdasarkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban publik, tertib hukum, politis dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan ekonomis menguntungkan masyarakat.

3. Asas Kepentingan Umum

Pembangunan Daerah dilaksanakan demi kepentingan masyarakat serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan pribadi warga negara serta pelestarian nilai-nilai luhur budaya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

4. Asas Keseimbangan dan Proporsionalitas

Pembangunan daerah mencakup semua bidang secara proporsional, baik material maupun spiritual, yang dikelola secara terpadu, serasi dan selaras demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir bathin.

5. Asas Proporsionalitas

Pengelolaan pembangunan dilaksanakan oleh pelaku pembangunan yang menguasai dan memanfaatkan IPTEK secara bertanggungjawab dengan memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

6. Asas Partisipasi

Pengelolaan pembangunan harus dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat sebagai pelaku dan pemerintah sebagai fasilitator dalam suasana kemitraan yang bertanggung jawab.

7. Asas Prioritas

Pengelolaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan keterbatasan potensi sumber daya yang ada dan dimiliki serta dinamika perkembangan lingkungan dengan menetapkan skala prioritas.

F. RUANG LINGKUP

Pola Dasar pembangunan daerah mencakup semua aspek pembangunan daerah di segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan memperhatikan keterpaduan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

G. SISTIMATIKA

Pola Dasar pembangunan daerah disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. KONDISI UMUM
- BAB III. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB IV. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V. KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB VI. PENUTUP

BAB II KONDISI UMUM

A. KONDISI DAERAH

Nusa Tenggara Timur adalah wilayah kepulauan dengan luas daratan 47.349,9 km² dan luas perairan ±200.000 km² memiliki 566 buah pulau, diantaranya 42 buah pulau yang dihuni, sementara 524 pulau lainnya tidak berpenghuni. Secara geografis, Nusa Tenggara Timur adalah Propinsi paling selatang Indonesia yang berbatasan dengan Negara Australia dan Timor Timur, terletak di antara 8° - 12° Lintang Selatan dan antara 118° - 125° Bujur Timur. Berbatasan sebelah Utara dengan Laut Flores, sebelah Selatan dengan Lautan Hindia, sebelah Barat dengan Propinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelah Timur dengan Timor Timur. Wilayah Nusa Tenggara Timur secara administratif terbagi dalam 14 kabupaten/kota, 124 kecamatan, 309 Kelurahan dan 2207 desa.

Keadaan iklim pada umumnya kering (semi arid) dengan musim hujan yang pendek antara bulan November - Maret dan musim kemarau bulan April - Oktober dengan klasifikasi tipe iklim menurut Schmidt dan Ferguson bervariasi dari B sampai F, di mana tingkat penyebaran tipe iklim E paling luas (48,8 %). Curah hujan tidak merata, tertinggi di Pulau Flores bagian Barat, Pulau Timor bagian Tengah, Pulau Sumba bagian Barat dengan rata-rata 1200 mm - 3000 mm per tahun. Sedangkan Pulau Flores bagian Timur, Pulau Alor, Pulau Sumba bagian Timur dan beberapa bagian lainnya relatif kering dengan rata-rata curah hujan antara 800 mm - 1000 mm per tahun. Secara Morfologi sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur berbukit-bukit

dan bergunung-gunung dengan derajat kemiringan rata-rata lebih dari 50%, sehingga sangat rawan terhadap berbagai bencana alam.

Nusa Tenggara Timur memiliki keragaman bahasa, suku, agama, sistem nilai dan tradisi masing-masing, mempunyai pola interaksi sosial yang khas, berbasis gotong-royong dan sangat kaya dengan nilai-nilai estetika, etika dan toleransi yang tinggi.

B. POTENSI

Potensi pembangunan daerah dibedakan antara sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya investasi dan hasil pembangunan di berbagai bidang.

1. Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam Nusa Tenggara Timur terdiri atas sumber daya lahan pertanian, pertambangan dan kelautan. Lahan pertanian mencakup 33,7% dari luas wilayah daratan Nusa Tenggara Timur, yang terdiri dari 2,6% lahan basah dan 31% lahan kering. Dari luas lahan pertanian tersebut terdapat 17 kawasan andalan yang dapat dikembangkan berbasis sistem agribisnis dan agroindustri yang menghasilkan komoditi unggulan seperti komoditi ternak di Timor dan Sumba dan komoditi perkebunan di Flores dan Alor. Potensi kelautan dan perikanan meliputi 80,86% wilayah dari total luas \pm 200.000 km², dengan garis pantai mencapai 5.700 km, belum termasuk perairan ZEEI yang kaya dengan potensi sumber daya hayati kelautan mencapai 240.000 ton/tahun dan potensi nener 680.000.000 ekor/tahun.

Propinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi tambang yang dapat menjadi sumber perekonomian daerah. Ada indikasi kandungan mineral industri strategi seperti emas, mangan, barit, marmer dan gips yang belum diketahui besar depositnya. Beberapa jenis yang telah diusahakan adalah bahan galian untuk pembuatan semen seperti batu kapur, tanah liat dan pasir besi. Juga terdapat beberapa jenis batuan bernilai ekspor antara lain: batu berwarna Pangajawa di Ende, batu hitam di Alor dan Kolbano di Timor Tengah Selatan. Unsur-unsur geotermal terdapat di daratan Pulau Flores berupa sumber panas bumi yang belum diketahui potensinya. Sumber energi alternatif lainnya seperti matahari, angin dan sumber air terjun sebagian sudah dieksploitasi, walaupun belum memberikan hasil yang memuaskan. Selain itu masih terdapat potensi wisata budaya, wisata alam dan wisata bahari.

2. Sumber Daya Manusia

Penduduk Propinsi Nusa Tenggara Timur hasil sensus penduduk tahun 2000 berjumlah 3.929.039 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.991.791 orang (50,69%) dan perempuan 1.937.248 orang (49,31%). Penyebaran tenaga kerja menurut tingkat pendidikan pada tahun 1999: tidak sekolah 14,92%, tidak/belum tamat SD 29,45%, tamat SD 34,77%, tamatan SMTP 7,56%, tamatan SMTA/Akademi/Universitas 13,30%. Data ini memperlihatkan kualitas sumber daya manusia dari segi pendidikan relatif rendah. Akibatnya daya serap bagian terbesar tenaga kerja masih menumpuk pada sektor tradisional, dengan penyebaran: sektor primer 77,91%, sektor

sekunder 7% dan sektor tersier 15,09% dari total tenaga kerja 2.853.915 orang.

Derajat kesehatan telah terjadi perbaikan, seperti tergambar melalui indikator: usia harapan hidup (laki-laki 62,86 tahun, perempuan 65,06 tahun), angka kematian bayi 59 per 1000 kelahiran hidup, Angka kematian Ibu 13 orang per 1000 kelahiran, status gizi baik 50,4% pada tahun 1995 dan meningkat menjadi 61,3% pada tahun 1999. Secara keseluruhan kualitas SDM dapat dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1996 sebesar 62,1.

3. Sumber Daya Investasi

Pembangunan masih didominasi oleh investasi pemerintah, sehingga percepatan pembangunan relatif lambat. Diharapkan dalam lima tahun ke depan investasi swasta berperan makin besar dan mampu mendorong perkembangan perekonomian daerah, sehingga kegiatan pelayanan umum dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilaksanakan lebih optimal. Kegiatan investasi hingga 1999 baru mencapai PMDN Rp. 161.849,4 juta dan PMA \$ 56.858.

Kegiatan investasi tidak merata, lebih terkonsentrasi pada pusat perkembangan Kota Kupang yaitu PMDN mencapai 64,9% dan PMA 64,4%. Kegiatan investasi PMDN dan PMA pada wilayah lainnya yaitu (i) Kabupaten Kupang 12,6% PMDN, 22,3% PMA; (ii) Kabupaten TTU 2,2% PMA; (iii) Kabupaten Belu 4,5% PMA; (iv) Kabupaten Alor 1,6% PMDN; (v) Kabupaten Flores Timur 4,3% PMDN dan 3,1% PMA; (vi) Kabupaten Sumba Timur 5,9% PMDN, 4,3% PMA; (vii) Kabupaten Sumba Timur 5,9% PMDN; dan (viii) Kabupaten Sumba Barat 3,6% PMA.

PMDN lebih didominasi oleh kegiatan industri, mencapai 67,3% diikuti dengan perikanan 11%, pariwisata 9,1%; perkebunan 8,1, perumahan 2,7%, peternakan 1,5%; dan penerangan 0,3%. Sedangkan investasi PMA didominasi oleh penerangan dan telekomunikasi 64,4%; perikanan 19,6%; peternakan 12,3%; pariwisata 3,6%.

C.HASIL-HASIL PEMBANGUNAN

Pembangunan yang telah dilaksanakan menunjukkan adanya kemajuan, perkembangan, peningkatan dan pertumbuhan di berbagai bidang kegiatan yang merupakan potensi pembangunan;

1. Ekonomi Rakyat

Perekonomian Propinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 1997 mengalami tekanan yang cukup besar akibat krisis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tahun 1997 (atas dasar harga konstan 1993) sebesar 5,62%, kemudian menurun menjadi -2,73% pada tahun 1998, dan meningkat lagi menjadi 2,74% pada tahun 1999. Tingkat pertumbuhan perekonomian yang relatif rendah disebabkan oleh basis ekonomi yang relatif terbatas dan struktur perekonomian yang belum seimbang. Struktur perekonomian masih didominasi sektor pertanian yang cenderung meningkat dalam pembentukan PDRB dengan kontribusi 39,01% tahun 1997, tahun 1998 meningkat menjadi 39,21%

dan 44,05% pada tahun 1999. Sektor industri yang merupakan sektor prioritas memberikan kontribusi, masih sangat kecil sebesar 2,03% pada tahun 1997, 1,98% pada tahun 1998 dan 1,88% pada tahun 1999. Kecenderungan peningkatan pada kegiatan kepariwisataan.

Pendapatan perkapita penduduk merupakan salah satu indikator tingkat kemakmuran masyarakat. Pada tahun 1997 pendapatan perkapita Nusa Tenggara Timur menurut harga berlaku sebesar Rp. 1.055.295,-, tahun 1998 meningkat menjadi Rp. 1.239.499,- dan pada tahun 1999 menjadi Rp. 1.397.805. Walaupun pendapatan perkapita meningkat namun daya beli masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dan kebutuhan produksi karena masih terjadi inflasi yang relatif tinggi.

Total pengeluaran per kapita perbulan pada tahun 1999, untuk kelompok masyarakat dengan pengeluaran sampai dengan Rp. 99.999 perbulan sebanyak 83,61%; kelompok pengeluaran Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 199.999 sebesar 14,02%, sedangkan kelompok pengeluaran di atas Rp. 200.000 hanya 2,37%. Data ini memperlihatkan rendahnya daya beli per kapita masyarakat Nusa Tenggara Timur.

2. Pembangunan Pendidikan Rakyat

Pembangunan pendidikan juga telah menunjukan berbagai kemajuan. Perkembangan pembangunan pendidikan pada tahun 1999 dapat digambarkan bahwa: (a). Pendidikan yang tamat SD dan tidak tamat SD sebesar 75,21%, (b). Tamat SLTP 7,56% dan tamat SLTA 2,72%, (c). Rata-rata NEM lulusan SD 5 - 6, lulusan SLTP 5,25 - 5,80, lulusan SMU 5,38 dan lulusan SMK 5,47, (d). Angka partisipasi murni SD/MI sebesar 10,61% dan angka transisi SD/MI sebesar 61,34%, (e). Angka putus sekolah SD 3,83% dan SLTP 4,11%. (f). Angka partisipasi murni SLTP sebesar 45,01%.

Pada dasarnya permasalahan guru di Nusa Tenggara Timur berkisar pada jumlah yang tidak mencukupi untuk daerah-daerah pedalaman, mutu dan Selera konsumen atas suatu barang atau jasa tertentu. Kedua, tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kualitas hidup yang relatif masih rendah. Kondisi ini diindikasikan oleh: a). Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama di pedesaan tentang paradigma hidup sehat, b). Rendahnya kualitas lingkungan, c). Memburuknya status gizi khususnya pada kelompok penduduk usia di bawah lima tahun sehingga dapat menurunkan kualitas fisik dan intelektual, d). kondisi alam yang kurang menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Keempat, masih kentalnya nilai-nilai tradisional sehingga mengakibatkan perilaku masyarakat yang lebih berorientasi pada pola hidup konsumtif. Kelima, lambatnya pemulihan ekonomi. Kondisi ini diindikasikan oleh: a). Kurangnya investasi swasta sehingga mengakibatkan masih terbatasnya kesempatan kerja, masih tingginya jumlah pengangguran, b). Meningkatnya jumlah drop out pada berbagai tingkat pendidikan, c). Kurang diperhatikannya hak dan perlindungan terhadap tenaga kerja, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), d). Masih banyaknya penduduk (116,628 orang) yang memilih hidup/tinggal di dalam kawasan hutan lindung.

3. Rendahnya Tingkat Pendidikan Rakyat.

Permasalahan rendahnya tingkat pendidikan rakyat tercermin dari tingkat pendidikan rakyat atau penduduk usia sekolah yang tidak atau belum pernah bersekolah sebesar 376.170. Diketahui pula bahwa penduduk yang tidak atau belum tamat sekolah dasar sebesar 989.890 orang. Sedangkan yang berpendidikan sekolah dasar sebesar 880.890 orang. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Nusa Tenggara Timur masih sangat rendah sehingga penanganan permasalahan pendidikan menjadi permasalahan yang menonjol di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Masalah kedua adalah mutu pendidikan yang rendah. Selama lima tahun terakhir, sebagai contoh NEM rata-rata SD hanya mencapai 5,00-6,00, SLTP 5,52-5,80. Pada tahun 1999, NEM rata-rata SMU/SMK di Nusa Tenggara Timur hanya mencapai 5,38 (SMU) dan 5,47 (SMK). Disamping itu, jenis pendidikan belum sesuai dengan peta kebutuhan daerah (relevansi sekolah) dimana sekolah-sekolah kejuruan masih belum memadai keberadaannya baik jumlah maupun kualitasnya. Disamping itu, masalah kesempatan belajar juga terbatas. Angka partisipasi murni menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 10,61% anak usia sekolah dasar yang belum mengenyam sekolah dasar karena angka transisi SD/MI sebesar 61,34%. Angka itu akan semakin besar bila ditambah dengan angka putus sekolah yang mencapai 3,83%. Sementara itu, angka partisipasi murni SLTP hanya mencapai 45,01% selain angka putus sekolah yang mencapai 4,11%. Masih timpangnya ratio jumlah sekolah dan guru antara daerah yang satu dengan daerah lainnya terutama antara perkotaan dan pedesaan serta kualifikasi guru yang layak belum memadai sesuai kebutuhan.

4. Rendahnya Tingkat Kesehatan Rakyat.

Permasalahan pembangunan kesehatan di NTT adalah masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Kondisi ini dicirikan oleh: tingginya angka kematian kasar (AKK), angka kematian ibu (AKI), angka kematian balita (AKBal) dan angka kematian bayi (AKB). AKK Nusa Tenggara Timur pada tahun 1998 sebesar 8,7% per 1.000 kelahiran, lebih tinggi dari AKK nasional sebesar 7,5% per 1.000 kelahiran. Sementara AKB sebesar 48 per 1.000 kelahiran hidup, lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang mencapai 41 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Nusa Tenggara Timur adalah 860 per 100.000 kelahiran hidup, hampir tiga kali lipat dari angka nasional yang mencapai 373 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKBal di Nusa Tenggara Timur mencapai 82 per 1.000 balita dan angka nasional mencapai sebesar 81 per 1.000 balita.

Rata-rata jumlah hari sakit mendekati 100 hari per orang dan penyakit yang diderita lebih banyak bersifat laten yang sebelumnya tidak pernah terdeteksi. Kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat produksi dan produktivitas masyarakat. Disamping itu, beberapa permasalahan lainnya adalah: (a). masih terbatasnya fasilitas kesehatan rumah sakit, (b). Menurunnya kualitas layanan rumah sakit, (c). Meningkatnya pertambahan penduduk yang belum diikuti

dengan ketersediaan layanan tempat tidur di rumah sakit dari 46,9 tempat tidur per 100.000 orang menjadi 43,2 tempat tidur per 100.000 orang, (d). Kurang seimbangnya rasio dokter, para medis, juru rawat, jumlah sarana dan prasarana kesehatan terhadap jumlah masyarakat, luasnya jangkauan layanan kesehatan. (e). Pada tahun 1999 telah dicapai Usia Harapan Hidup (UHH) laki-laki 62,86 tahun dan perempuan 65,06 tahun.

Permasalahan pembangunan kesehatan di NTT tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor kesehatan, tetapi disebabkan juga oleh faktor-faktor lain seperti: (a). Permasalahan kemiskinan sebagaimana telah diterangkan di atas, (b). Krisis ekonomi yang mempengaruhi menurunnya alokasi anggaran bidang pembangunan kesehatan, (c). Daya beli masyarakat yang cenderung menurun termasuk kemampuan untuk membeli jasa layanan kesehatan, (d). Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, (e). Tingkat kesulitan geografis dan topografis NTT dengan tingkat kemiringan yang tinggi, sehingga menyulitkan jangkauan layanan kesehatan sampai ke daerah terpencil, jumlah tenaga medis seperti dokter dan tenaga non medis masih kurang.

5.Partisipasi Masyarakat.

Salah satu permasalahan pembangunan di daerah NTT adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Hal ini terlihat sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan, dimana peran masyarakat masih relatif rendah. Kurang terlibatnya masyarakat dalam proses pembangunan berakibat pada sikap dan perilaku masyarakat yang kurang menguntungkan bagi proses pelaksanaan pembangunan daerah. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat nampak pula pada lemahnya sikap proaktif dan kreativitas masyarakat. Hal ini menggambarkan masih kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan manusia, usaha dan lingkungan (tri daya) yang sesungguhnya perlu segera ditingkatkan agar kinerja pembangunan daerah dapat ditingkatkan. Faktor penyebab permasalahan diatas antara lain: (a). Belum luasnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengembangkan inisiatif, kreativitas dan sikap mandiri berkenaan dengan keterlibatannya dalam berbagai aktivitas pembangunan, (b). Belum terdorongnya masyarakat untuk menerima inovasi pembangunan.

6.Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Salah satu permasalahan otonomi daerah adalah berkenaan dengan cara pandang tentang urgensi pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Pada dasarnya otonomi daerah memiliki 3 aspek yaitu: aspek personalia, aspek pembiayaan dan aspek prasarana sehingga mampu mendorong kreativitas, pelayanan prima dan demokratisasi pengelolaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan. Cara pandang yang masih bersifat parsial telah mengakibatkan adanya ketimpangan koordinasi pelaksanaan ketiga aspek di atas sehingga pelaksanaan otonomi daerah menjadi sempit dan kurang bermakna. Kondisi ini telah mempengaruhi kemauan baik

pemerintah untuk secara bertahap meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ke depan akan mempengaruhi kemauan baik pemerintahan reformasi untuk mengurangi, memberantas praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana yang antara lain disyaratkan clean government dan good governance.

7. Belum Meratanya Penyebaran Infrastruktur.

Infrastruktur pembangunan merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan pada umumnya. Kondisi pembangunan infrastruktur yang secara kualitas dan kuantitas dirasakan belum cukup untuk menunjang terlaksananya pembangunan sebagaimana diharapkan, telah menjadi prioritas perhatian pemerintah. Ketersediaan infrastruktur pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial serta bidang pembangunan lainnya seperti: air bersih, lingkungan perumahan yang bersih, sekolah, rumah sakit, puskesmas/pustu, pasar, alat transportasi, prasarana jalan dan jembatan, pelabuhan laut dan udara, rumah ibadah, kelembagaan ekonomi sosial, budaya masyarakat dan lainnya yang masih kurang dan belum merata persebarannya atau masih terkonsentrasi pada daerah-daerah perkotaan telah mengakibatkan kurangnya minat investasi khususnya investasi swasta dalam mengelola berbagai ketersediaan sumber daya alam yang ada pada kawasan-kawasan pengembangan di NTT.

8. Pengelolaan Lingkungan Yang Belum Optimal.

Perspektif lingkungan pembangunan terdiri dari: (a). Lingkungan sosial, (b). Lingkungan buatan, (c). Lingkungan alam. Lingkungan sosial berhubungan dengan perilaku, pola tindak, sikap mental masyarakat. Lingkungan buatan berhubungan dengan berbagai kegiatan atau perbuatan manusia untuk mengubah sesuatu yang belum dan kurang menjadi sesuatu yang ada dan lebih. Lingkungan alam berhubungan dengan anugerah yang diterima oleh manusia dan masyarakat melalui alam atau sumber daya alam.

Belum optimalnya pengelolaan berbagai lingkungan yang ada disebabkan oleh faktor tingginya lahan kritis dan tingginya frekuensi timbulnya ancaman bahaya kekeringan akibat kondisi alam/iklim. Kondisi tersebut mendorong adanya penurunan keanekaragaman hayati. Penyebab lain adalah rendahnya tingkat diversifikasi energi sehingga menekan kondisi lingkungan, adanya potensi rawan bencana seperti bencana alam, penyakit dan belum terbinanya sikap solidaritas, sikap akulturasi dan inkulturasi serta kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai inovasi, modernitas atau nilai-nilai universal lainnya bagi suatu kehidupan yang ideal.

9. Tata Ruang.

Implementasi tata ruang yang tidak konsisten sesuai peruntukannya telah menimbulkan berbagai permasalahan penataan ruang. Faktor penyebabnya antara lain: (a). Masih rendahnya pemahaman fungsi tata ruang, (b). Rendahnya aspek penegakan hukum (law enforcement), (c). Masih rendahnya tingkat kualitas produk tata ruang akibat kurang mampunya tata ruang tersebut beradaptasi

dengan dinamika pembangunan, (d). Adanya permasalahan atau konflik tanah.

10. Penyelesaian Pengungsi Timor Timur.

Besarnya jumlah pengungsi dibandingkan daya tampung dan kemampuan daerah telah berpengaruh nyata terhadap kinerja pembangunan daerah, baik menyangkut keamanan, pelayanan sosial ekonomi dan psikologis masyarakat terutama berkaitan dengan isu-isu kerusuhan, sanksi PBB dan lainnya.

11. Tantangan Globalisasi.

Globalisasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang antara lain meliputi aspek ekonomi, politik dan sosial budaya. Berdasarkan kondisi ini diperlukan persiapan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan memilih dampak globalisasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

12. Lemahnya Penegakan Hukum dan HAM.

Lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) secara konsisten dan konsekuen antara lain disebabkan oleh belum terlaksananya pembangunan hukum yang komprehensif baik yang berhubungan dengan materi, perangkat dan kelembagaan hukum. Intensitas peningkatan produk peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah (Perda) dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta sarana dan prasarana hukum pada kenyataannya tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum, kesadaran, mutu pelayanan publik di bidang hukum kepada masyarakat. Akibat kepastian hukum dan jaminan hukum tidak tercipta yang akhirnya melemahkan penegakan supremasi hukum, semakin meluasnya praktek KKN, semakin sulit mencari kebenaran dan keadilan.

Tekad untuk memberantas praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di berbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan pada kenyataan belum diikuti oleh langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah termasuk aparat penegak hukum untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Adanya intervensi dan atau pengaruh pihak lain dalam penyelesaian proses peradilan, semakin melemahkan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kondisi demikian mengakibatkan penegakan dan perlindungan hukum serta penghormatan HAM masih memprihatinkan yang tercermin dari terjadinya berbagai pelanggaran HAM.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

A. VISI

Terwujudnya manusia dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang mandiri, maju dan sejahtera lahir dan bathin secara adil dan merata

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. MISI

Demi terwujudnya manusia dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri dan sejahtera secara adil dan merata, maka misi pembangunan daerah adalah:

nMeningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila secara baik dan benar, terutama dalam menumbuhkembangkan prinsip saling menghormati antara berbagai komunitas yang berbeda, tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia, berbudi pekerti luhur, berdisiplin tinggi dan berwawasan jender demi terwujudnya keamanan, ketertiban, ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

nMemberdayakan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku utama pembangunan melalui optimalisasi pemberdayaan ekonomi rakyat, pendidikan rakyat dan kesehatan rakyat dengan dukungan aparatur penyelenggara pemerintahan daerah sebagai fasilitator yang profesional, adil, jujur, transparan serta bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.

nMewujudkan otonomi daerah yang bertanggungjawab sebagai proses demokratisasi dan pemerataan pembangunan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memupuk kerjasama regional dan internasional bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

C. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur adalah terwujudnya manusia dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang usia harapan hidupnya panjang dengan derajat kesehatan yang tinggi, mempunyai pengetahuan dengan kemampuan menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta mempunyai standart hidup layak yang diukur dengan PDRB Riil Per Kapita (daya beli).

D. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi pembangunan daerah adalah Pertumbuhan Melalui Pemerataan dengan prinsip membangun dari apa yang dimiliki rakyat dan apa yang ada pada rakyat, melalui:

nPeningkatan kualitas sumber daya manusia yang dititikberatkan pada pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

nPenguatan dan peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi, politik, hukum, agama dan sosial budaya pada lingkup pemerintah dan masyarakat.

nPengalokasian sumber daya secara proporsional dan bertanggungjawab.

BAB IV ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan tujuan dan strategi pembangunan daerah yang ditetapkan, maka pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam tatanan masyarakat Nusa Tenggara Timur, dengan sasaran meningkatkan produksi dan produktivitas yang diukur dengan perbaikan daya beli per kapitan, sehingga secara mandiri berkemampuan mengelola pendidikan dan kesehatan sebagai indikator masyarakat maju dan sejahtera.

Sejalan dengan arah dan sasaran pembangunan daerah, maka prioritas pembangunan daerah pada Bidang Ekonomi, Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan sebagai kebijakan pokok dan didukung secara terpadu oleh bidang-bidang lainnya yang meliputi Bidang Kesejahteraan Sosial; Hukum dan HAM; Politik dan Pemerintahan Daerah; Agama, Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Penataan Ruang sebagai kebijakan penunjang.

1. Bidang Ekonomi

Bidang Pembangunan Ekonomi diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat dengan sasaran memberikan akses yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat di dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi tanpa merusak sumber daya alam dan lingkungan, melalui agenda-agenda sebagai berikut:

nMengembangkan basis-basis ekonomi rakyat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkemampuan memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pangan serta meningkatkan mutu dan jumlah komoditi ekspor dan substitusi impor yang berdaya saing tinggi di pasar domestik dan pasar internasional.

nMenciptakan iklim yang kondusif bagi pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan kemampuan kewiraswastaan dan kewirausahaan masyarakat; pengembangan lembaga keuangan mikro dan lembaga penjamin kredit (modal usaha); kemudahan bagi masuknya investasi dari luar daerah, pinjaman dan bantuan luar negeri; pengembangan usaha kecil dan menengah lokal melalui pola kemitraan-usaha; keterpaduan sektor usaha milik negara/daerah, swasta dan koperasi; peningkatan kemampuan kelembagaan, baik tradisi lokal maupun pranata ekonomi modern; demi terciptanya lapangan kerja dan perluasan kesempatan berusaha.

nMeningkatkan pemerataan kepemilikan dan pemanfaatan faktor-faktor produksi, terutama membuka akses masyarakat golongan ekonomi lemah terhadap modal usaha, informasi pasar, penguasaan

keterampilan dan teknologi yang didukung dengan penyediaan prasarana dan sarana produksi dalam rangka memperkuat basis-basis ekonomi rakyat sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli rakyat yang gilirannya akan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah melalui pajak, retribusi dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya serta kemandirian masyarakat dalam mewujudkan otonomi daerah yang bertanggungjawab.

nMenumbuhkan industri yang mampu berkembang cepat dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, memiliki akses luas pasar domestik dan pasar internasional, mengutamakan industri padat karya dengan memanfaatkan tenaga kerja setempat sebagai upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di sektor pertanian/pedesaan.

nMeningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan dan pembinaan sistem ekonomi kerakyatan dengan menggalang kerjasama yang terpadu antara instansi terkait, dunia usaha, LSM dan Perguruan Tinggi dan keterlibatan berbagai pihak dari luar negeri.

2. Bidang Pendidikan

Bidang Pembangunan Pendidikan diarahkan pada peningkatan derajat dan kualitas pendidikan rakyat yang berkemampuan menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan IPTEK berdasarkan nilai-nilai moral dan etik. Berdasarkan arah tersebut, maka sasaran Bidang Pembangunan Pendidikan jangka panjang adalah pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis, dan sasaran Bidang Pembangunan Pendidikan jangka pendek dititikberatkan pendidikan non-formal dengan sasaran meningkatkan kualitas angkatan kerja produktif untuk memperoleh keterampilan yang praktis dan aplikatif sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan. Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui agenda-agenda sebagai berikut:

nMeningkatkan mutu pendidikan formal dan non formal melalui pemantapan lembaga pendidikan, peningkatan mutu manajemen yang berbasis sekolah, jumlah dan mutu tenaga pendidikan, mutu materi pendidikan dengan mengitensifkan kurikulum muatan lokal, pendidikan keterampilan, pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, seni budaya daerah dan nilai-nilai Pancasila, dengan memberikan perhatian khusus pada pendidikan kejuruan, pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan pada sekolah negeri dan swasta.

nMengupayakan pemerataan kesempatan belajar pada pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta melalui penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta distribusi tenaga pendidikan.

nMengembangkan kerjasama yang terpadu antara pemerintah, dunia usaha swasta, koperasi, LSM dan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan IPTEK dalam usaha agribisnis, agroindustri dan agrowisata yang memiliki keunggulan kooperatif dan kompotitif, melalui pendidikan non-formal, balai latihan kerja, sentra-sentra kegiatan ekonomi, pola pembinaan sistem inkubator, pemagangan serta mengintensifkan lembaga penyuluhan dan pembinaan masyarakat yang membuka peluang bagi penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha mandiri.

3. Bidang Kesehatan

Bidang Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola kesehatan secara mandiri dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan rakyat yang tinggi dan usia harapan hidup yang panjang. Pencapaian sasaran tersebut melalui agenda-agenda:

nMeningkatkan kemampuan manusia dan masyarakat untuk mengelola pola hidup sehat bagi diri dan lingkungannya.

nMeningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta melalui peningkatan kualitas, jumlah dan kinerja tenaga medis dan paramedis; peningkatan kelembagaan kesehatan; pemerataan penyediaan obat dengan harga yang terjangkau masyarakat; serta peningkatan dukungan prasarana dan sarana kesehatan.

nMengembangkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dan swasta bagi perbaikan gizi masyarakat, pengawasan terhadap obat, bahan makanan dan minuman, penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan ibu dan anak, gerakan Keluarga Berencana, pelayanan kesehatan jiwa, pengawasan terhadap penyalahgunaan Narkoba dan penanggulangan bahaya HIV AIDS.

4. Bidang Kesejahteraan Sosial

Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial diarahkan pada pemberdayaan manusia dan masyarakat dengan sasaran menumbuhkembangkan kebersamaan, kesetiakawanan sosial, etos kerja, disiplin, sportivitas dan daya juang yang dilaksanakan melalui agenda-agenda:

nMeningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat terhadap upaya penyelamatan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial: penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar dan kelompok rentan sosial, korban bencana alam melalui pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan sosial dan penyediaan lapangan kerja.

nMeningkatkan perlindungan masyarakat, melalui pemberdayaan

masyarakat dalam rangka kesiapan pelaksanaan penyelamatan, penanggulangan dan rehabilitasi bencana alam dan bencana lainnya.

nMenciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai dan pranata tradisi sosial budaya lokal, serta mengembangkan bahasa Daerah dalam memperkaya khasanah perbendaharaan bahasa Indonesia.

nMeningkatkan kemampuan manusia dan masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai seni-budaya daerah melalui pemberdayaan sentra-sentra kesenian (sanggar seni) masyarakat sebagai aset pembangunan daerah.

nMeningkatkan kemampuan perempuan dalam iklim yang kondusif demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

nMengembangkan suasana yang sehat dan terbuka bagi pembinaan generasi muda untuk mengaktualisasi segenap potensi, bakat dan minat, sekaligus mencegah ancaman budaya destruktif.

nMeningkatkan kebugaran, disiplin, daya juang dan sportivitas manusia dan masyarakat melalui kegiatan olahraga.

nMengembangkan kerjasama terpadu antara instansi terkait, dunia usaha swasta dan LSM dalam peningkatan mutu dan jumlah tenaga kerja produktif, pembinaan lembaga ketenagakerjaan, penyebaran penduduk melalui transmigrasi lokal dalam rangka perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

nMeningkatkan kesejahteraan keluarga kecil bahagia melalui peningkatan kesadaran tentang KB Mandiri.

5. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pembangunan Bidang Hukum dan HAM diarahkan untuk mewujudkan supremasi hukum dan penegakan HAM melalui agenda-agenda:

nMeningkatkan kesadaran hukum masyarakat; kemampuan, profesionalisme dan keteladanan aparat hukum; penguatan kelembagaan hukum termasuk penyidik PPNS; dan pembentukan materi hukum.

nMelaksanakan penelitian dan pengkajian bagi pembentukan dan pengembangan materi hukum termasuk materi hukum adat pertanahan melalui kerjasama perguruan Tinggi, LSM dan Lembaga Penelitian terkait.

nMeningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM.

6. Bidang Politik dan Pemerintahan

Bidang Pembangunan Politik dan Pemerintahan diarahkan pada peningkatan kemampuan manusia dan masyarakat untuk mengembangkan kehidupan politik yang demokratis dengan sasaran terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, yang dilaksanakan melalui agenda-agenda:

nMeningkatkan kesadaran politik rakyat melalui pendidikan politik, komunikasi politik dan keteladanan yang dilaksanakan oleh infrastruktur politik demi pemantapan peran aktif rakyat yang lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sekaligus untuk mengembangkan tata kehidupan politik yang demokratis, terbuka dan stabil dalam rangka penegakan sistem Demokrasi Pancasila.

nMeningkatkan kemampuan, profesionalisme dan integritas penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat suprastruktur politik demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bebas KKN.

nMengembangkan dan meningkatkan kerjasama di segala bidang pembangunan dan pemerintahan atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan dengan Kabupaten dalam Propinsi, dengan Propinsi lain, dan dengan badan atau lembaga lokal, regional, nasional dan internasional.

nMemantapkan dan mengembangkan profesionalisme aparatur pemerintahan sebagai fasilitator dalam melaksanakan fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pembangunan; peningkatan disiplin dan kinerja; perbaikan kesejahteraan serta perbaikan prasarana dan sarana kerja.

nMeningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan dan pemerintahan melalui peningkatan peran media massa dan penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat.

7. Bidang Agama

Bidang Pembangunan Agama diarahkan untuk mengembangkan kerukunan antar umat beragama yang dilaksanakan melalui agenda-agenda:

nMenumbuhkembangkan semangat kemajemukan dengan prinsip saling menghormati demi terwujudnya kehidupan yang harmonis secara berkelanjutan.

nMengembangkan iklim yang kondusif bagi peningkatan peran aktif tokoh-tokoh agama dalam seluruh aspek kegiatan sosial kemasyarakatan.

nMeningkatkan kemampuan kelembagaan agama untuk berperan secara

maksimal melalui penyediaan prasarana dan sarana yang memadai.

8. Bidang keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Bidang Pembangunan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diarahkan pada peningkatan kesadaran manusia dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan suasana kehidupan yang aman, tentram dan tertib, yang dilaksanakan melalui agenda-agenda:

nMeningkatkan kemampuan manusia dan masyarakat untuk melaksanakan sistem keamanan swakarsa dengan pendekatan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemantapan prasarana dan sarana.

nMeningkatkan kemampuan daya tangkal masyarakat terhadap berbagai kemungkinan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

nMewujudkan keamanan regional demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan aktivitas masyarakat lainnya yang didukung oleh aparat keamanan.

9. Bidang Tata Ruang

Bidang Pembangunan Tata Ruang diarahkan pada pembentukan sistem wilayah pembangunan dengan sasaran terciptanya pertumbuhan wilayah yang adil dan berimbang serta terjalinnya interaksi dan sinergi yang kuat bagi pembangunan daerah, yang dilaksanakan melalui agenda-agenda:

nMenata dan mengembangkan fungsi setiap unit tata ruang wilayah berdasarkan kesesuaian, kemampuan, keterkaitan, keseimbangan dan keselarasan daya dukung ruang.

nMemantapkan status kawasan termasuk kawasan perbatasan berdasarkan penataan ruang wilayah dan negara.

nMeningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatatur pemerintahan untuk menaati ketentuan peraturan perundangan mengenai tata ruang.

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah-kaidah pelaksanaan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut:

Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berkewajiban menggerakkan dan mengarahkan semua potensi dan seluruh kekuatan komponen pembangunan pemerintah dan masyarakat untuk secara serasi

dan terpadu melaksanakan pembangunan daerah sesuai arahan Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Gubernur bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban menjabarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) ke dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Seluruh jajaran aparat pemerintahan daerah, berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA).

Gubernur berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan; serta melaporkan kegiatan pembangunan berbagai komponen masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur agar dapat diketahui kemajuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

BAB VI PENUTUP

Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2004 ditetapkan dalam semangat Otonomi Daerah. Sejalan dengan itu, maka seluruh kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dengan titik berat pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Orientasi kebijakan baru ini menempatkan pemerintah selaku fasilitator yang lebih berperan sebagai pengarah dan penggerak daripada pelaksana pembangunan.

Peran pemerintah sebagai fasilitator, memiliki bobot yang semakin berat. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan upaya maksimal: memperbaiki system dan kinerja aparatur; memantapkan profesionalisme, etika dan budaya kerja yang berwawasan kewirausahaan; meningkatkan mutu sumber daya manusia yang menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang prima; serta menumbuhkan rasa kemanusiaan, kepekaan hati nurani dan kehalusan budi pekerti.

Pertumbuhan melalui pemerataan sebagai strategi pembangunan daerah membuat tanggung jawab pemerintah semakin mengemuka dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat melampauai kemampuan pemerintah. Dengan demikian keikutsertaan masyarakat semakin penting dan menentukan, terutama kalangan dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat, dalam pengelolaan pembangunan daerah. Peran aktif seluruh komponen masyarakat sebagai pelaku pembangunan, diyakini akan mempercepat proses pemerataan, sekaligus membangun basis yang kokoh bagi pertumbuhan perekonomian daerah dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan otonomi daerah secara bertanggung jawab.

Tantangan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur semakin berat, namun proses pembangunan harus terus berjalan dengan memanfaatkan apa yang ada dan apa yang dimiliki. Kita berkeyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

TTD.

PIET ALEXANDER TALLO